

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 131/Pdt.P/2025/PA.BL)

Oleh

Regita Ade Putri Fransiska
20107710025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan meninjau Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Kawin (Studi Putusan Nomor: 131/Pdt.P/2025/PA.Bl) dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang relevan dengan topik penelitian dan dari data sekunder data yang diperoleh dari dokumen resmi, arsip, literatur maupun perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Hukum yang mengatur Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini kesiapan fisik dan psikis berhubungan erat dengan usia guna tercapainya tujuan perkawinan. Dimana usia untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun meskipun begitu masih ada yang melangsungkan perkawinan dibawah usia. Untuk itu diberikan solusi yang ingin melaksanakan perkawinan dibawah usia yaitu dispensasi kawin.

Pada hasil penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin ialah (1) faktor kehamilan diluar kawin, (2) faktor pendidikan, faktor ekonomi, (3) faktor lingkungan dan adat. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak, mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat dan memeberikan nasihat kepada semua pihak.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Dispensasi Kawin, PERMA Nomor 5 Tahun 2019*

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION APPLICATIONS BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 5 OF 2019 CONCERNING GUIDELINES FOR ADJUDGING MARRIAGE DISPENSATION APPLICATIONS

(DECISION STUDY NUMBER: 131/Pdt.P/2025/PA.BL)

By:

Regita Ade Putri Fransiska
20107710025

This study aims to identify, understand, and review Marriage Dispensation Applications based on Supreme Court Regulation Number 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Applications (Decision Study Number: 131/Pdt.P/2025/PA.Blt) and to understand the judges' considerations in determining marriage dispensation application decisions. This study uses empirical methods. The data sources for this study are primary data collected directly from primary sources relevant to the research topic, and secondary data obtained from official documents, archives, literature, and legislation relevant to the research topic.

The law governing marriage in Indonesia is Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In this case, physical and psychological readiness are closely related to age in achieving the goals of marriage. While the age for marriage is regulated in the Marriage Law, despite this, some marriages still occur under the legal age. Therefore, a solution is offered for those wishing to marry under the legal age of consent: marriage dispensation.

This study found that the factors contributing to marriage dispensation include (1) premarital pregnancy, (2) education, economic factors, and (3) environmental and customary factors. The judicial considerations in deciding marriage dispensation cases, based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, include considering the best interests of the child, hearing testimony from all parties involved, and providing advice to all parties.

Keywords: Legal Review, Marriage Dispensation, PERMA Number 5 of 2019